

**PENERAPAN *CONSTITUENT RECALL* PEJABAT
POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM
UPAYA PENGUATAN KEDAULATAN RAKYAT**

SKRIPSI



OLEH :

ACHMAD ZARKSYI YAHYA
NIM : 1311900312

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PENERAPAN *CONSTITUENT RECALL* PEJABAT
POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM
UPAYA PENGUATAN KEDAULATAN RAKYAT**

SKRIPSI



Oleh:

Achmad Zarksyi Yahya

NIM : 1311900312

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PENERAPAN CONSTITUENT RECALL PEJABAT
POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM
UPAYA PENGUATAN KEDAULATAN RAKYAT**

SKRIPSI

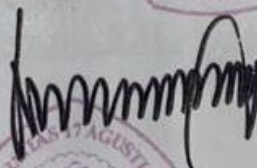
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

Achmad Zarksyi Yahya

NIM : 1311900312

Dosen Pembimbing



Dr. Hufron, S.H., M.H.

NIP: 20310130610

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PENERAPAN *CONSTITUENT RECALL* PEJABAT
POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM
UPAYA PENGUATAN KEDAULATAN RAKYAT**

Oleh:
Achmad Zarksyi Yahya
NIM: 1311900312

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal: Selasa, 27 Juni 2023

Berdasarkan
Surat Keputusan Dekan No. SK: 640/ST/FH/VI/2023
Tanggal : 27 Juni 2023

TIM PENGUJI:

Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.
NPP : 196606181991031002
Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
NPP : 20310880149
Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
NPP : 20310130612



Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Zarkasyi Yahya

NIM : 1311900312

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artiker yang akan di muat di Jurnal mengkaji Indonesia pada Volume 2 Nomor 1 Juli 2023. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMI/>, yang berjudul:

URGENSI PENERAPAN *CONSTITUTENT RECALL*

Bahwa Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 Juni 2023
membuat Pernyataan,



Achmad Zarkasyi Yahya

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Zarkasyi Yahya
NIM : 1311900312
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan di muat di Jurnal mengkaji Indonesia pada Volume 2 Nomor 1 Juli 2023.

<https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMI/>, yang berjudul:

URGENSI PENERAPAN *CONSTITUTENT RECALL*

Bahwa Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 Juni 2023

Yang membuat Pernyataan,



Achmad Zarkasyi Yahya

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Zarkasyi Yahya

NBI : 1311900312

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "SKRIPSI" yang saya buat, yang berjudul :

"PENERAPAN *CONSTITUENT RECALL* PEJABAT POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM UPAYA PENGUATAN KEDAULATAN RAKYAT"

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 17 Juni 2023

Yang membuat Pernyataan,



Achmad Zarkasyi Yahya

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Zarkasyi Yahya
Nomor Mahasiswa : 1311900312

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

“PENERAPAN *CONSTITUENT RECALL* PEJABAT POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM UPAYA PENGUATAN KEDAULATAN RAKYAT”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 17 Juni 2023
Yang membuat Pernyataan,



Achmad Zarkasyi Yahya

LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Nikmat serta kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta kesabaran. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya Penulisan Skripsi sebagai Tugas Akhir dapat terselesaikan. Teristimewa kupersembahkan sebuah tulisan ini kepada Ibuku tercinta yang sangat saya sayangi dan sangat saya hormati. Terimakasih atas kasih sayang, do'a, motivasi, semangat, serta pengorbanan yang telah engkau berikan sampai dengan hari ini tulisan ini dibuat.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat dan hidayah-nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan *Constituent Recall* Pejabat Politik Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Upaya Penguatan Kedaulatan Rakyat”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

Kedua Orang tuasaya, yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

1. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPAI, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menjadi bagian dari civitas academica Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya periode 2017-2021
3. Ibu Wiwik Afifah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik selama perkuliahan
4. Ibu Wiwik Afifah, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing dan membina selama perkuliahan.

5. Bapak Dr. Hufron SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing dan mengarahkan pengerjaan skripsi hingga selesai.
6. Bapak maupun Ibu Dosen, yang telah banyak memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Sahabat Seperjuangan, Tamara Sujarwo Putri, Istriani, Muhammad Dacha Ramadhan, Dendi Tantular, Achmad Fathur Rozi, Az-Zahra Auralia, Dessy Ratna Sari. Selalu kompak dikampus dan teman yang selalu sharing bersama tentang perkuliahan dan selalu ada dalam suka maupun duka.
8. Teruntuk kedua orang tua dan kakak saya. Terima Kasih.
9. Terkhusus untuk diri saya sendiri mampu berdikari hingga menyelesaikan tulisan ini dengan tempo yang sangat singkat.
10. Terimakasih untuk pihak-pihak yang tidak dapat disebut-satu-persatu yang telah memberi dorongan kepada penulis untuk tidak berhenti berusaha.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis mengharap kansegala bentuk saran sertamasukan bahkan kritik yang membangun. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum.

Surabaya, 17 Juni 2023

Penulis

ABSTRAK

Kedaulatan rakyat adalah pedoman dalam negara demokrasi. Dalam tercapainya kedaulatan rakyat maka negara harus menjaga dan mengayomi segala keinginan rakyat. Penulisan ini bertujuan untuk membuka wawasan terbaharukan mengenai konsep *constituent recall* atau *recall referendum* dalam upaya menguatkan kedaulatan rakyat. Selama ini konsep *recall* terjadi di Indonesia secara penuh dikuasai oleh partai politik dan dipandang menciderai marwah kedaulatan rakyat. Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan kerangka konseptual, dan kasus. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk pemecahan suatu masalah atas isu hukum yang ada, tentunya didukung dengan pendekatan undang-undang yang berkaitan dengan isu yang diangkat, serta mengangkat kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan menggunakan kerangka konseptual yang berpedoman dengan pandangan dan doktrin yang legal dalam ilmu hukum. Partai politik dinilai menghambat proses penyaluran aspirasi masyarakat di dalam lembaga legislatif, sering kali melakukan *recall* tanpa meminta persetujuan rakyat sebagai pemberi delegasi utama terhadap anggota DPR dan DPRD. Sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai kedaulatan rakyat, maka dari itu dalam prosesi *recall* terhadap anggota legislatif harus mengikutsertakan rakyat, dalam proses penggantian antar waktu anggota legislatif dengan proses *constituent recall* untuk melibatkan rakyat secara langsung dalam penarikan atau penggantian anggota legislatif yang terkusus terhadap anggota DPR dan DPRD secara demokratis dengan mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga dalam prosesnya menjadi transparan dan demokratis.

Kata Kunci: partai politik, *constituent recall*, kedaulatan rakyat.

ABSTRACT

Sovereignty of the people is a guideline in a democratic country. In achieving people's sovereignty, the state must guard and protect all the wishes of the people. This writing aims to open updated insights regarding the concept of constituent recall or referendum recall in an effort to strengthen people's sovereignty. So far, the concept of recall occurring in Indonesia is fully controlled by political parties and is seen as injuring the spirit of people's sovereignty. In this paper using the type of normative legal research, by taking a statutory approach, and using a conceptual framework, and cases. In other words, this research aims to solve a problem of existing legal issues, of course supported by a statute approach related to the issue raised, as well as raising cases that have permanent legal force, and using a conceptual framework that is guided by views and doctrines. legal in law. Political parties are seen as hampering the process of channeling people's aspirations within the legislature, often carrying out recalls without asking for the approval of the people giving the main delegation to members of the DPR and DPRD. As stated in the 1945 Constitution regarding the sovereignty of the people, therefore in the process of recalling members of the legislature the people must be involved, in the process of replacing members of the legislature between periods with a constituent recall process to involve the people directly in withdrawing or replacing members of the legislature which focuses on members of the DPR and DPRD in a democratic manner by prioritizing people's sovereignty, so that the process becomes transparent and democratic..

Keywords: *political parties, constituent recall, people's sovereignty.*

DAFTAR ISI

SKRIPSI	2
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	16
PENDAHULUAN	16
1.1 Latar Belakang Masalah.....	16
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Penelitian	21
1.4 Manfaat Penelitian	21
1.5 Metode Penelitian	21
1.5.1 Jenis Penelitian	21
1.5.2 Metode Pendekatan.....	22
1.5.3 Sumber Data dan Jenis Bahan Hukum	22
1.5.1 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
1.5.2 Teknik Analisis Bahan Hukum	23
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
2.1 Kedaulatan Rakyat	25
2.2 Recall	26
2.3 Partai Politik.....	27
2.4 Lembaga Perwakilan.....	28

2.5 <i>Constituent Recall</i>	32
BAB III	21
PEMBAHASAN	21
3.1 Urgensi Penerapan <i>Constituent Recall</i> bagi Pejabat Politik Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Upaya menegakkan Kedaulatan Rakyat.....	21
3.1.1 Pengaturan Penggantian Antar Waktu dan Perkembangannya	21
3.1.2 Mekanisme <i>Recall</i> di Berbagai Negara.....	41
3.1.3 Urgensi Penerapan <i>Constituent Recall</i>	51
3.2 Kendala Penerapan <i>Contituent Recall</i> Bagi Pejabat Politik Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Upaya Menegakkan Keadaulatan Rakyat	55
3.2.1 Hubungan Partai Politik dengan Lembaga Perwakilan.....	55
3.2.2 Konsep <i>Constituent Recall</i> Sebagai Alternatif Penyelesaian Sistem <i>Recall</i> Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia	65
BAB IV	74
PENUTUP	74
4.1 Kesimpulan.....	74
4.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

DARTAR GAMBAR

Tabel 3.2-1 Alur <i>Recall</i> Anggota DPR Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3	66
Tabel 3.2-2 Alur <i>Recall</i> Anggota DPR melalui Sistem Referendum.....	71
Tabel 3.2-3 Alur <i>Recall</i> Anggota DPRD melalui Sistem Referendum.....	71